

B13

HIBAH DANA SPF 2017

LAPORAN PENELITIAN



**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK DAN
KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2013-2016)**

TIM PENELITI

Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA
Fenny Marietza, SE, M.Ak

0020088201
0001048303

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	: Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2013-2016)
KetuaPeneliti	
a. Nama Lengkap	: Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA
b. NIP/NIK	: 19820820 200604 1 014
c. NIDN	: 0020088201
d. Tanggal lulus Magister/Master	: 30 Desember 2011
e. Pangkat/Golongan	: Penata Muda/III.a
f. Jabatan fungsional	: Asisten Ahli
g. Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi
h. Pusat Penelitian	: Sistem Informasi Akuntansi
i. Alamat Institusi	: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu
j. Telepon/Faks/E-mail	: 08117390098 / madani.unib2006@gmail.com
Peneliti Anggota	: 1 Orang
Nama Anggotal	: Fenny Marietza
NIDN	: 0001048303
Bidang Keahlian	: Akuntansi Keuangan
Dana yang diusulkan	: Rp 4.750.000,-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Lizar Alfansi, SE, MBA, Ph.D
NIP. 19640601 198903 1005

Bengkulu, 30 Oktober 2017
Ketua Peneliti,

Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA
NIP. 19820820 200604 1 014

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Bengkulu

Dr. Ir. Abimanyu Dipo Nusantara, MP
NIP. 19561225 198603 1 003

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN
KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ-45)**

**Madani Hatta
Fenny Marietza**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan *book tax difference* (BTD). Variabel independennya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan terkonsentrasi. Sampel penelitian ini adalah 24 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 dari tahun 2013-2015. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan terkonsentrasi.

**THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, PUBLIC OWNERSHIP, AND
CONCENTRION OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE
(Empirical Study on Companies Listed in LQ-45 Index)**

**Madani Hatta
Fenny Marietza**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership, public ownership and concentrated ownership on tax avoidance. Dependent variable in this study is tax avoidance as measured by book tax difference (BTD) proxy. Independent variables are institutional ownership, public ownership, and concentrated ownership. The sample of this study is 24 companies that listed in LQ-45 index from 2013-2015. Method of ata collection used purposive sampling techniques.

This study use multiple regression as the method of analysis. The results show that institutional ownership and public ownership do not effect on tax avoidance. Concentrated ownership negatively effect on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance, institutional ownership, public ownership, concentrated ownership*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Agensi.....	8
2.1.2 Pengindaran Pajak.....	9
2.1.3 Kepemilikan Institusional.....	11
2.1.4 Kepemilikan Publik.....	12
2.1.5 Kepemilikan Terkonsentrasi.....	13
2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis.....	14
2.2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2.2 Pengembangan Hipotesis.....	17
2.3 Kerangka Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	23
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	23
3.4.1 Variabel Dependen.....	23
3.4.2 Variabel Independen.....	24
3.4.3 Variabel Kontrol.....	25
3.5 Metode Analisis Data.....	26
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	27
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	27
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	34
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	37
4.3.1 Uji Normalitas Data.....	37
4.3.2 Uji Multikolenieritas.....	39
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	39
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	40
4.4 Pengujian Model Penelitian Menggunakan Pooled Data.....	41
4.4.1 Uji Chow (Chow Test).....	42

4.4.2 Uji Hausman (Hausman Test).....	42
4.5 Pengujian Hipotesis.....	44
4.5.1 Pengujian Hipotesis 1.....	44
4.5.2 Pengujian Hipotesis 2.....	45
4.5.3 Pengujian Hipotesis 3.....	45
4.6 Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Implikasi Penelitian.....	50
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	52
5.4 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Statistik Deskripsi	34
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas Data.....	38
Tabel 4.4 Hasil pengujian Normalitas Data (setelah membuang outlier).....	38
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolenieritas.....	39
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	40
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Autokorelasi	40
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Autokorelasi (setelah lag 2).....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Chow	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman.....	43
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Pengujian Hipotesis	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	21
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh Negara Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang didapat dari situs Badan Pusat Statistik, pendapatan terbesar dari Negara adalah berasal dari perpajakan dimana selama kurun waktu 5 tahun ini selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2011, pajak di Indonesia, telah memberikan pendapatan untuk Negara sebesar Rp 873.874 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 mencapai Rp 1.240,4 triliun (www.bps.go.id, 2016).

Pendapatan yang diterima negara memang baik untuk pemerintah, namun tidak bagi perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak wajib membayar besarnya pajak berdasarkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan menghasilkan laba bersih yang tinggi, maka perusahaan akan membayar pajak yang besar pula. Pembayaran yang besar inilah yang tidak diinginkan oleh perusahaan, sehingga akan meminimalisasi besaran pajak yang dibayarkan. Tindakan meminimalisasi pembayaran pajak salah satunya dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan besaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi pajak yang terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2014).

Tindakan penghindaran pajak ini akan menimbulkan masalah keagenan. (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan teori keagenan menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perbedaan ini disebabkan adanya asimetri informasi dimana adanya pemisahan fungsi antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi yang terjadi ini membuat manajer akan bertindak sesuai dengan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak dari pemilik. Tindakan yang dilakukan salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak ini tidak sejalan dengan kehendak dari pemilik karena akan menimbulkan resiko yaitu berdampak pada reputasi perusahaan yang menurun di mata publik sebagai akibat dari kurangnya transparansi penyampaian informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Rossarzi, 2016). Tindakan penghindaran pajak dan masalah keagenan ini dapat diminimalisasi diantaranya dengan kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan terkonsentrasi.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain (Jensen dan Meckling, 1976). Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan, sehingga salah satu tindakan *oportunistik* manajer yaitu melakukan tindakan penghindaran pajak. Khurana dan Moser (2009); Setiawati dan Setiawanta (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional mampu mengurangi tindakan

penghindaran pajak. Sedangkan Annisa dan Kurniasih (2012); Arlina (2015) menemukan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas yang memiliki saham tidak lebih dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar. kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu. Sehingga membuat perusahaan harus memberikan kinerja yang baik dan patuh terhadap pembayaran pajak, karena akan mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014, konsentrasi kepemilikan adalah perseorangan atau perusahaan/badan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh persen) atas perusahaan tersebut. Kepemilikan saham yang semakin terkonsentrasi akan menyebabkan pemilik saham menjadi pengontrol perusahaan, sehingga manajer akan sulit untuk bertindak berdasarkan tujuannya salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan pemilik yang mayoritas (terkonsentrasi) akan lebih menjaga reputasi perusahaan kedepannya dan lebih rela untuk membayar pajak

sesuai dengan besaran yang ditentukan (Chen *et. al.*, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et. al.*, (2010); Rusydi dan Martani, (2014); Maretha (2017) menemukan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham di perusahaan tersebut, perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Sari dan Martani (2010) menemukan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak.

Salah satu proksi yang digunakan untuk melihat perusahaan melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak adalah *book tax difference* (BTD). Chen *et. al.* (2010) menjelaskan *book tax differences* (BTD), kalkulasinya adalah laba sebelum pajak (*pre-tax income*) dikurangi estimasi penghasilan kena pajak (*taxable income*) diskalakan dengan total assets tahun sebelumnya. BTD mencerminkan aktifitas penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tetap dan temporer antara laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak. Dalam buku Resmi (2014) menjelaskan perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut perpajakan. Perbedaan temporer atau sementara adalah perbedaan pengakuan pajak yang timbul karena adanya perbedaan antara jumlah aset atau liabilitas tercatat pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Hasil dari *Book Tax Difference* (BTD) menjelaskan bahwa jika semakin tinggi laba akuntansi dibandingkan dengan laba fiskal perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajaknya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rusydi dan Martani (2014) yang berjudul pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance untuk menguji hubungan antara *struktur kepemilikan yaitu kepemilikan terkonsentrasi (keluarga), kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak*. Penemuan ini membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi yang ada di Indonesia tidak melakukan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu struktur kepemilikan yang akan diuji adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Penelitian sebelumnya menggunakan *kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah*.

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu seluruh perusahaan yang termasuk yang terdaftar di LQ45 dengan metode pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Periode sampel penelitian ini adalah 2013-2015 karena dapat mewakili kondisi akhir dari ekonomi perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

- 2) Apakah kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
- 3) Apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk membuktikan pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
- 2) Untuk membuktikan pengaruh negatif kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak
- 3) Untuk membuktikan pengaruh negatif kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

- 1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan referensi dan masukan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 dari tahun 2013-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan hanya berfokus pada pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu, kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan terkonsentrasi. Variabel dependennya yaitu penghindaran pajak yang diukur dengan *book tax difference*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (*agent*). *Principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan *principal* sehingga masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kepentingannya, manajer akan mengambil keputusan yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan pemilik modal apabila pemisahan fungsi antara kepemilikan dan pengelolaan semakin meluas sehingga menimbulkan konflik keagenan.

Pemisahan fungsi yang semakin meluas, akan menyebabkan asimetris informasi dimana manajer akan bertindak sesuai dengan keinginannya dan tidak sejalan lagi dengan kepentingan *principal*. Manajer sebagai orang yang menjalankan perusahaan akan memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik saham. Ketidaksempurnaan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2015).

Masalah keagenan dan asimetris informasi ini akan mengeluarkan biaya keagenan, dimana untuk memastikan manajer bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan sebagai berikut:

1. *Monitoring Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar pekerjaan manajer tidak menyimpang dan juga dengan memberikan insentif yang tepat kepada manajer.

2. *Bonding Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan merugikan perusahaan dan juga prinsipal.

3. *Residual Loss*

Biaya yang setara dengan pengurangan kesejahteraan dari principal sebagai dampak dari adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan besaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi pajak yang terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Suandy, 2014). Penghindaran pajak didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Menurut Suandy (2014), beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak, antara lain :

- 1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penghindaran bahkan pelanggaran.
- 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
- 3) Kemungkinan untuk terdeteksi (ketahuan). Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
- 4) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Salah satu proksi yang digunakan untuk melihat perusahaan melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak adalah *book tax difference* (BTD) (Chen *et. al.*, 2010; Rusydi dan Martani, 2014; Rossarzi, 2016; Maretha, 2017). Chen *et. al.* (2010) menjelaskan *book tax differences* (BTD), kalkulasinya adalah laba sebelum pajak (*pre-tax income*) dikurangi estimasi penghasilan kena pajak (*taxable income*) diskalakan dengan total assets tahun sebelumnya. BTD mencerminkan aktifitas penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tetap dan temporer antara laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak. Semakin tinggi laba

akuntansi dibandingkan dengan laba fiskal perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajaknya.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya dkk., 2014). Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pengawasan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kepemilikan saham di suatu perusahaan yang semakin tinggi maka kepatuhan dan kinerja manajemen menjadi meningkat dan salah satunya berdampak berkurangnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Publik

Sumber pendanaan perusahaan tentulah tidak dari pendanaan internal saja namun dari pendanaan eksternal. Salah satu pendanaan eksternal perusahaan diperoleh dari saham yang dibeli oleh masyarakat (publik). Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas yang memiliki saham tidak lebih dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar.

Penyertaan saham oleh masyarakat mencerminkan adanya harapan dari masyarakat bahwa pihak manajemen perusahaan akan mengelola saham tersebut dengan sebaik-baiknya dan dibuktikan dengan tingkat laba dan kinerja perusahaan yang baik (Purba, 2004). Perusahaan dengan tingkat laba yang terus tumbuh dan memiliki kinerja perusahaan yang baik akan memberikan kepercayaan kepada publik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sebaliknya, kinerja perusahaan yang buruk dan penurunan tingkat laba akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi publik untuk menanamkan modal mereka.

Kepemilikan saham oleh publik memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu kekuatan yang berupa komentar atau kritikan melalui media massa. Kepemilikan publik ini akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan

manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunistik*, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan akan patuh terhadap pajak karena dengan meningkatnya saham yang dimiliki masyarakat, perusahaan akan menjaga citra perusahaany agar masyarakat percaya perusahaan yang dipilihnya adalah perusahaan yang baik. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya. Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya.

2.1.5 Kepemilikan Terkonsentrasi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014, konsentrasi kepemilikan adalah perseorangan atau perusahaan/badan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh persen) atas perusahaan tersebut. Said *et al.* (2009) mengemukakan pada kepemilikan terkonsentrasi sebagian besar kepemilikan dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang digunakan untuk memonitor dan memiliki informasi yang cukup untuk mengasumsikan fungsi pengawasan.

Dallas (2004) menyatakan konsentrasi kepemilikan terjadi karena adanya pemusatan kepemilikan pada suatu pihak tertentu sehingga menungknkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur perusahaan. Konsentrasi kepemilikan terbagi dalam dua bentuk, yaitu kepemilikan

terkonsentrasi (*ownership concentration*) dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham menyebar jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan lainnya.

Manajer sebagai agen menginginkan kompensasi atas kinerjanya yang sebagian besar diukur oleh laba sehingga manajer cenderung lebih *oportunistik* untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemilik menginginkan investasi yang dimilikinya tetap aman (Maretha, 2017). Sehingga struktur kepemilikan yang terkonsentrasi akan memonitor tindakan manajer agar memilih tindakan yang sesuai dengan kepentingan pemilik.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan.

Berikut adalah uraian beberapa penelitian mengenai penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Khurana dan Moser (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka

pendek akan lebih agresif. Sebaliknya perusahaan dengan banyak pemegang saham institusional jangka panjang kurang agresif.

Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al.* (2010) dengan judul “*Are family firm more aggressive than non-family firm?*”. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini karena pemilik keluarga memiliki kepemilikan yang lebih besar dan rentang waktu penelitian yang lebih lama, sehingga membuat pemilik keluarga lebih peduli dengan reputasi perusahaannya dan lebih rela membayar pajak yang lebih tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dengan judul “*pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*”. Variabel dependennya adalah *tax avoidance* dan variabel independen adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Hasil penelitian menemukan kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Martani (2014) dengan judul “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*” menggunakan *aggressive tax avoidance* sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen yang digunakan adalah struktur kepemilikan (keluarga, asing, dan pemerintah). Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga tidak melakukan penghindaran pajak. Artinya bahwa kepemilikan keluarga ini mendorong

perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak melakukan *aggressive tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Arlina (2015) dengan judul “*analisis pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*” menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Sementara variabel independennya adalah komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, komponen eksekutif, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa komite audit, kualitas audit, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maretha (2017) dengan judul “*pengaruh kepemilikan terkonsentrasi dan corporate governance terhadap agresivitas pajak*”. Variabel dependen adalah agresivitas pajak dan independennya adalah kepemilikan terkonsentrasi, komite audit, direktur independen. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Direktur independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2.2 Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik agensi terjadi karena adanya asimetri informasi yang disebabkan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer, sehingga manajer akan bertindak oportunistik dengan mengabaikan

kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Shleifer dan Vishney, 1986).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya dkk., 2014). Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat. Keputusan yang diambil manajemen akan sesuai dengan keinginan pemegang saham salah satunya yaitu perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian dari Khurana dan Moser (2009); Setiawati dan Setiawanta (2014). menemukan bahwa kepemilikan institusional yang semakin tinggi penghindaran pajak akan menurun. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran

Pajak

2.2.3 Kepemilikan Publik dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan publik merupakan pemegang saham minoritas yang memiliki saham tidak lebih dari 5% dari keseluruhan saham yang beredar. kepemilikan publik dalam suatu perusahaan, maka akan mendorong manajemen lebih transparan sehingga perusahaan tidak dikendalikan untuk memenuhi kepentingan kalangan tertentu.

Kepemilikan saham oleh publik memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yaitu kekuatan yang berupa komentar atau kritikan melalui media massa. Kepemilikan publik ini akan menyebabkan awalnya perusahaan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, namun dengan adanya kepemilikan saham oleh publik, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan (tidak sesuai dengan kehendaknya sendiri). Semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin banyak informasi di perusahaan yang diketahui oleh publik tentang perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan manajer tidak dapat leluasa melakukan tindakan *opportunistik*, salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak.

Peningkatan saham yang dimiliki oleh masyarakat membuat perusahaan harus memberikan kinerja yang baik dan patuh terhadap pembayaran pajak, karena akan mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan kepemilikan saham yang dimiliki publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat umumnya.

Masyarakat akan mengharapkan adanya kontribusi dari perusahaan kepada pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai besaran yang dikenakan atau tidak melakukan penghindaran pajak sehingga dapat membantu pemerintah untuk pembangunan negaranya.

H2: Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.2.4 Kepemilikan Terkonsentrasi dan Penghindaran Pajak

Teori agensi menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Ketidaktepatan penyebaran informasi yang ada antara informasi yang dimiliki manajer dengan informasi yang dimiliki pemilik saham ini memunculkan suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (*information asymmetry*) (Rusydi dan Martani, 2015). Asimetri informasi ini akan membuat manajer melakukan tindakan *oportunistik* yang salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak.

Masalah ini dapat diminimalisasi dengan semakin tinggi tingkat konsentrasi kepemilikan yang ada diperusahaan. Tingginya kepemilikan yang terkonsentrasi ini membuat adanya pengawasan yang lebih untuk manajer untuk melakukan tindakan oportunistiknya salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Konsentrasi Kepemilikan adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh perseratus) atas perusahaan tersebut. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014).

Terkonsentrasinya kepemilikan akan menimbulkan masalah keagenan yang lain dalam perusahaan. Dimana terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu

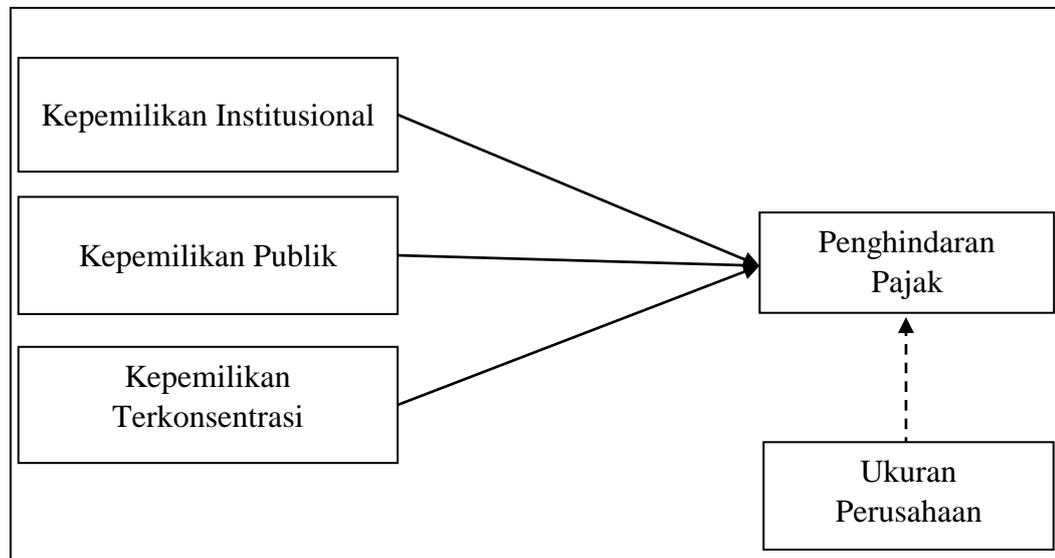
pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga membuat pemilik saham minoritas menginginkan adanya keuntungan lebih dari perusahaan tersebut dengan mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Namun pemegang saham mayoritas tidak menginginkan hal tersebut karena akan menyangkut dengan reputasi perusahaan kedepannya dan lebih rela untuk membayar pajak yang lebih tinggi (Chen *et. al.*, 2010).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan yang terkonsentrasi keluarga cenderung tidak melakukan agresivitas pajak (Chen *et. al.*, 2010; Rusydi dan Martani, 2014). Hal ini menjelaskan bahwa pada kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali lebih mementingkan reputasi perusahaan dan menghindari biaya pajak seperti penalti dan sanksi sehingga perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi menghindari agresivitas pajak. Dengan demikian hipotesis keempat sebagai berikut:

H3: Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3 Kerangka Penelitian

Melihat dari hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dapat digolongkan ke dalam penelitian empiris dan bersifat kuantitatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh fenomena yang dijadikan objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Penelitian yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini mengutamakan penelitian terhadap data dan fakta empiris dengan menggunakan sumber data sekunder.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di LQ45 periode 2013-2015. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah secara *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Sampel perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang selama periode tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang termasuk di LQ 45 periode 2013-2015 berturut-turut.
- b. Mempunyai data yang lengkap yang berhubungan variabel yang diteliti.
- c. Perusahaan yang laporan tahunan dalam mata uang rupiah dan pelaporan keuangan berakhir 31 Desember.
- d. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan agar hasil tidak bias.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter berupa laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan mengolah literature, artikel, jurnal, dan media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian..

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

3.4.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang diukur dengan *Book Tax Difference* (BTD). *Book-tax difference (BTD)* digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara laba berdasarkan buku dan pendapatan pajak terhadap total asset perusahaan (Chen *et. al.*, 2010). Semakin tinggi nilai BTD, maka semakin tinggi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini, perhitungan *book-tax difference* mengacu pada penelitian Chen *et. al.* (2010); Rusydi dan Martani (2014); Rossarzi (2016); Maretha (2017) yaitu membagi selisih laba sebelum pajak

dengan laba kena pajak terhadap total asset tahun sebelumnya dengan rumus sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \frac{\text{Pretax income} - \text{taxable income}}{\text{Total assets}_{t-1}}$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan publik, dan kepemilikan terkonsentrasi.

3.4.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga antara lain seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank ataupun perusahaan-perusahaan swasta lain. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Annisa dan Kurniasih, (2012); Annisa dan Setiawati, (2014):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusi Lain}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

3.4.2.2 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik menunjukkan besarnya persentase saham yang dimiliki oleh publik. Pengukuran kepemilikan publik dilihat berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masyarakat dibagi saham yang beredar (Bayu, 2014).

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Publik}}{\text{Total Saham}} \times 100\%$$

3.4.2.3 Kepemilikan Terkonsentrasi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014, konsentrasi kepemilikan adalah perseorangan atau perusahaan/badan baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh persen) atas perusahaan tersebut. Sehingga penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dimana:

1: kepemilikan saham terkonsentrasi jika kepemilikan 50% atau lebih

0: kepemilikan saham tidak terkonsentrasi jika kepemilikan kurang dari 50%

Kepemilikan terlihat apakah kepemilikan lebih dari 50% atau tidak:

$$\text{Kepemilikan Terkonsentrasi} = \frac{\text{Pemegang Saham Terbesar}}{\text{Total Saham}}$$

3.4.3 Variabel Kontrol

3.4.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan dapat dihitung dari jumlah asetnya karena ukuran perusahaan diproksikan dengan *natural log* dari total aset. Penggunaan *natural log* pada penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi

data tanpa mengubah proporsi nilai asal. Ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Bayu, 2014):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis utama yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif dan dilakukan pengujian kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda karena untuk mengetahui hubungan kausal antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel-variabel independen dengan penghindaran pajak. Persamaan model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \alpha + B_1 \text{KI}_i + B_2 \text{KP}_i + B_3 \text{KT} + B_4 \text{SIZE} + \varepsilon_i$$

Keterangan :

ETR = *Effective Tax Rate*
 KI = Kepemilikan Institusional
 KP = Kepemilikan Publik
 KT = Kepemilikan Terkonsentrasi
 SIZE = Ukuran Perusahaan
 α = Konstanta
 B = Koefisien Regresi
 ε = *error*

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dimaksudkan untuk menghasilkan parameter model penduga yang baik. Parameter penduga yang baik akan memenuhi kriteria *Best Linear Unbias Estimation* (BLUE), sehingga dapat dipastikan bahwa data telah terbebas dari permasalahan asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan untuk hipotesis yang meliputi pengujian normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik, yang terdiri dari :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi dari variabel *random* yang kontinyu dan merupakan distribusi yang simetris. Sebuah variabel mungkin mempunyai karakteristik yang tidak diinginkan seperti data yang tidak normal yang mengurangi ketepatan pengujian hipotesis atau bisa signifikan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Dalam

penelitian ini menggunakan Uji *statistic Jarque-Bera*. Adapun hipotesis dari uji *Jarque-Bera test* adalah sebagai berikut:

H_0 : Data terdistribusi normal

H_1 : Data tidak terdistribusi normal

Tolak H_0 jika probabilitas dari *Jarque-Bera* kurang dari tingkat signifikansi ($p\text{-value} < 10\%$).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2011). Untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel independen. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinieritas (Ajija, dkk, 2011).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan $Obs \cdot R\text{-Squared}$, dimana jika

nilai probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi (Ajija, dkk., 2011).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi terjadinya heterokedastisitas dilakukan uji *white heterokedasticity* dengan menggunakan *Software Eviews 9*. Hasil yang diperhatikan dari Uji ini adalah nilai F dan *Obs*R-squared*. Jika nilai *p-value* dari *Obs*R-squared* lebih kecil dari 1%, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji F

Uji Signifikan simultan atau Uji F yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria untuk pengujian hipotesis uji f ini adalah jika nilai f hitung $>$ f tabel, maka akan disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya jika f hitung $<$ f tabel, maka tidak ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Atau jika nilai f hitung $>$ f tabel tetapi pada tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan

bahwa seluruh variabel independen serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan suatu model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang ada. Dengan demikian akan diketahui seberapa besar variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen yang ada. Nilai yang mendekati angka 1 berarti variabel independen hampir atau mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2011)

3.5.3.3 Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t test. Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Apabila *p-value* < 5% maka hipotesis diterima dan apabila *p-value* > 5% maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2011). Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan dua uji yaitu uji arah (nilai koefisien β) dengan penilaian negatif atau positif dari nilai koefisiennya dan uji signifikansi untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut ini rincian untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini :

- 1) Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan model persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut untuk menguji arah koefisien β (uji arah) :

$H_{01} : \beta \geq 0$ Kepemilikan intitusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a1} : \beta < 0$ Kepemilikan intitusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya kriteria pengujian signifikansi yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi koefisien regresi β_1 . Jika nilai *p-value* $< 0,05$ maka H_{a1} diterima yang artinya kepemilikan intitusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

- 2) Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan model persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut untuk menguji arah koefisien β (uji arah) :

$H_{01} : \beta \geq 0$ Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a1} : \beta < 0$ Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya kriteria pengujian signifikansi yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi koefisien regresi β_1 . Jika nilai *p-value* $< 0,05$ maka H_{a1} diterima yang artinya kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3) Pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan model persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut untuk menguji arah koefisien β (uji arah) :

$H_{01} : \beta \geq 0$ Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a1} : \beta < 0$ Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya kriteria pengujian signifikansi yang digunakan adalah dengan melihat nilai signifikansi koefisien regresi β_1 . Jika nilai *p-value* $< 0,05$ maka H_{a1} diterima yang artinya kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk di LQ 45. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dengan metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Dengan kriteria tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 29 perusahaan. Adapun jumlah sampel pada tahun pengamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Perusahaan	Presentase (%)
Perusahaan Masuk di LQ 45 tiga tahun berturut-turut	29	100
Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang Dollar	(4)	21
Perusahaan yang mengalami kerugian dan manfaat pajak	(1)	26
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel	24	54
Jumlah Observasi Penelitian (dikali 3 tahun)	72	

Sumber: data sekunder diolah, 2017

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif merupakan analisis data yang menggambarkan data atau variabel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan meliputi, nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Book Tax Difference* (BTD), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Publik (KP), Kepemilikan Terkonsentrasi (KT), dan Ukuran Perusahaan (SIZE). Statistik deskriptif penelitian disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Dev.
BTD	72	0.057403	-0.070900	0.285640	0.076650
KI	72	0.441678	0	0.849900	0.281328
KP	72	0.374522	0.020100	0.807900	0.154314
SIZE	72	31.50396	34.44450	29.71530	1.298567
Variabel Katagorian					
Kepemilikan Terkonsentrasi (KT)					
Kategori	Dummy	Jumlah	Presentase		
<50%	0	16	22.2%		
≥50%	1	56	77.8%		

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan hasil pengujian statististik deskriptif dari jumlah observasi (N) adalah sebanyak 72 observasi. Variabel penelitian pertama dalam statistik deskriptif adalah variabel penghindaran pajak (BTD). Nilai rata-rata variabel BTD sebesar 0.057403 yang menggambarkan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel sangat sedikit yang memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan

temporer sehingga dapat dikatakan tidak melakukan penghindaran pajak. Nilai standar deviasi dari variabel BTD adalah 0.076650, dimana nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata yang mengartikan bahwa variabel BTD bervariasi. Nilai maksimum dari BTD adalah 0.285640. Hal ini menggambarkan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki laba akuntansi yang lebih kecil dari laba fiskal. Artinya, perusahaan memanfaatkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer untuk meminimalisasi pengenaan kewajiban perpajakan pada tahun berjalan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak yang cukup tinggi. Nilai minimum dari BTD adalah -0.070900. Hal ini menunjukkan bahwa ada perusahaan tersebut menggunakan perbedaan tetap dan temporer antara laba pajak dan laba fiskal sehingga ketika dihitung laba fiskalnya sudah sesuai dengan kemungkinan pengenaan pajak penghasilan atas laba akuntansi dan perkiraan kewajiban pajaknya sudah sesuai perkiraan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Variabel berikutnya adalah kepemilikan Institusional (KI). Nilai rata-rata dari variabel KI yaitu sebesar 0.441678 yang menjelaskan bahwa rata-rata kepemilikan saham institusional perusahaan yaitu sebesar 44.1678%. Nilai standar deviasi dari variabel KI yaitu 0.281328. Apabila nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang mengartikan bahwa variabel KI tidak bervariasi. Nilai maksimum dari variabel KI adalah sebesar 0.849900 yang mengartikan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki saham institusional tertinggi terbesar yaitu 84.99%. Nilai

minimum dari variabel KI yaitu sebesar 0 yang mengartikan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel tidak memiliki saham intstitusional. Hal ini dikarenakan saham tersebut dimiliki oleh pemerintah, masyarakat, ataupun manajer.

Selanjutnya adalah variabel Kepemilikan Publik (KP). Nilai rata-rata dari variabel KP yaitu sebesar 0.374522 yang menjelaskan bahwa rata-rata kepemilikan saham publik di perusahaan yaitu sebesar 37.4522%. Nilai standar deviasi dari variabel KI yaitu 0.154314. Apabila nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai standar deviasi maka nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang mengartikan bahwa variabel KP tidak bervariasi. Nilai maksimum dari variabel KP adalah sebesar 0.807900 yang mengartikan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki saham publik tertinggi yaitu 80.79%. Nilai minimum dari variabel KP yaitu sebesar 0.02100 yang mengartikan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki saham publik terendah yaitu 2.01%.

Variabel selanjutnya yaitu Kepemilikan Terkonsentrasi (KT). KT dilihat dari apakah kepemilikan institusional lebih dari 50% atau tidak berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014. Jika lebih besar atau sama dengan 50% diberi angka 1 dan jika tidak diberi angka 0. Berdasarkan tabel 4.2 bahwa jumlah presentase perusahaan kepemilikan saham terkonsentrasi kurang dari 50% yaitu sebesar 22.2% dengan jumlah perusahaan sebesar 16 perusahaan. Jumlah kepemilikan saham terkonsentrasi yang lebih sama dengan dari 50% yaitu sebanyak 56 perusahaan dengan presentase sebesar 77.8%.

Varibel berikutnya adalah ukuran perusahaan (SIZE). Rata-rata variabel SIZE adalah 31.50396 sehingga rata-rata ukuran perusahaan pada sampel dapat

dikatakan besar. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 00001/BEI/01-2014, kriteria ukuran perusahaan yang besar apabila perusahaan memiliki aset bersih paling kurang Rp 100.000.000.000. Apabila di Ln kan, maka hasilnya sebesar 25.3284. Nilai rata-rata SIZE lebih besar dari standar deviasi yaitu sebesar 1.298567 yang menjelaskan bahwa variabel SIZE tidak bervariasi. Nilai maksimum dari SIZE menjelaskan bahwa ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki ukuran perusahaan terbesar yaitu sebesar 34.44450 sehingga dianggap perusahaan sebagai ukuran perusahaan besar. Nilai minimum dari SIZE menjelaskan ada perusahaan yang dijadikan sampel memiliki ukuran perusahaan yang terkecil yaitu sebesar 29.71530 sehingga dianggap sebagai ukuran perusahaan terkecil pada sampel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan apakah semua asumsi-asumsi yang diperlukan telah terpenuhi dan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias karena tidak semua data dapat diterapkan dalam regresi. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan alat uji *E-Views 9.0*.

4.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan maksud untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel yakni variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan dalam pengujian menggunakan aplikasi *Eviews 9.0* dengan menggunakan Uji *Jarque-Bera* (JB test) berdasarkan nilai residual. Residual dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai *p-value* diatas 10% dan tidak terdistribusi secara normal jika nilai *p-value* dibawah 10% (Ajija dkk., 2011). Hasil pengujian normalitas untuk seluruh variabel disajikan pada Tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas Data

Model	N	<i>Jaque-Bera</i>	<i>Probability</i>	Keterangan
1	72	20.00381	0.000045	Tidak Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa Uji *Jaque-Bera* (JB Test), terlihat model dalam persamaan dalam penelitian ini terdistribusi tidak normal karena *p-value* dari residual dibawah 10% ($0.0000045 < p\text{-value}$). Langkah yang dilakukan untuk menormalkan adalah dengan membuang data yang bersifat *outlier* dari keseluruhan observasi. Hasil setelah membuang data yang *outlier* disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Normalitas Data (setelah membuang *outlier*)

Model	N	<i>Jaque-Bera</i>	<i>Probability</i>	Keterangan
1	62	1.974898	0.372526	Normal

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Dari hasil perbaikan data observasi, tabel 4.4 menjelaskan bahwa data telah terdistribusi secara normal karena *p-value* diatas 10% dan banyaknya data obsevasi yang digunakan berkurang yang awalnya sebanyak 72 data menjadi 62.

4.3.2 Uji Multikolenieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Jika korelasi di antara masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinieritas. (Ajija dkk., 2011). Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Multikolenieritas

	KI	KP	KT	SIZE
KI	1	-0.25085	-0.07894	-0.44329
KP	-0.25085	1	-0.47174	0.050304
KT	-0.07894	-0.47174	1	0.072037
SIZE	-0.44329	0.050304	0.072037	1

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.5 tidak ada masalah multikolinieritas dalam persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, karena nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel independen kurang dari 0.8.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi terjadinya heterokedastisitas dilakukan uji *white*. Hasil yang diperhatikan dari Uji ini adalah nilai F dan *Obs* R-squared*. Jika nilai *p-value* dari *Obs* R-squared* lebih besar dari 1%, maka tidak terjadi heterokedastisitas, demikian juga, sebaliknya (Ajija dkk., 2011). Hasil uji heterokedastisitas disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	Obs*R-Squared	Probability	Keterangan
1	19.09856	0.1201	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel 4.6 diketahui model persamaan (1) memiliki *p-value Obs*R-Squared* sebesar 0.1201 (*p-value* > 0.01). Dengan demikian dari model persamaan tidak terkena masalah heterokedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji LM (Metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, dimana jika nilai probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan yaitu 5%, maka H_0 diterima dan tidak ada masalah autokorelasi. Hasil uji autokorelasi model persamaan ini disajikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Obs*R-Squared	Probability	Keterangan
1	11.80706	0.0006	Terkena Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.7 hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* terlihat nilai *Obs*R-Squared* pada model persamaan (1) sebesar 11.80706 dan memiliki nilai *p-value* yang kurang dari 0.05 dimana nilainya adalah sebesar 0.0006 sehingga disimpulkan persamaan (1) terkena masalah autokorelasi.

Untuk mengobati masalah autokorelasi, maka upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan lag 2. Maka hasil uji autokorelasi yang didapatkan disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi (setelah lag 2)

Model Persamaan	Obs*R-squared	Probability	Keterangan
1	11.82325	0.0027	Terkena Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.8 hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* terlihat nilai *Obs*R-Squared* pada model persamaan (1) sebesar 11.82325 dan memiliki nilai *p-value* sebesar 0.0027 yang dimana lebih kecil dari 0.05 (*p-value* < 5%) sehingga disimpulkan masih terkena masalah autokorelasi sehingga menggunakan pengujian *pooled data*.

4.4 Pengujian Model Penelitian menggunakan Pooled Data

Dalam pemilihan model secara valid, dilakukan pengujian untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan. Hal ini ditujukan agar pendekatan yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian dan karakteristik sampel yang digunakan sehingga menghasilkan estimasi hasil yang lebih tepat. Pemilihan model panel pertama menggunakan *Chow Test* yang membandingkan antara *Pooled least square* dan *Fixed effect Model*. Pemilihan model panel kedua menggunakan *Hausman Test* dengan membandingkan antara *Fixed effect Model* dan *Random effect Model*. Berikut ini akan dibahas pengujian untuk tiap model penelitian dan penentuan model mana yang digunakan untuk setiap persamaan regresi.

4.4.1 Uji Chow (*Chow Test*)

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai. Hipotesis uji Chow yaitu sebagai berikut.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas Chi-square > 0.05 maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square < 0.05 maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Chow adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob.	Keputusan	Model
Cross-section F	24.881227	0.0000		
Cross-section Chi-Square	190.043470	0.0000	Tolak H_0	Fixed

Sumber : data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0.000 lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai model *fixed effect* atau model *random effect*.

4.4.2 Uji Hausman (*Hausman Test*)

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu model *fixed effect* atau model *random effect*.

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas Chi-square > 0.05 maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square < 0.05 maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Square Statistic	Prob.	Keputusan	Model
Cross-section random	11.595844	0.0206	Tolak H_0	Fixed

Sumber : data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0.0206 lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*.

Berdasarkan hasil pengujian dalam menentukan model penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan yang digunakan menggunakan *fixed effect*. Untuk itu diperlukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas untuk model *fixed effect*.

4.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak. Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hipotesis penelitian ini terdiri dari tiga hipotesis. Dari hasil

pengujian model yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi menggunakan model *fix effect*. Hasil hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda untuk Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Nilai Koefisien	P Value
C		3.233886	0.0006
KI	β_2	0.375367	0.4736
KP	β_3	-0.042404	0.7535
KT	β_4	-0.073056	0.0362
SIZE	β_5	-0.103783	0.0003
<i>R-Squared</i>			0.936106
<i>Adjusted R-Squared</i>			0.896899
F			23.87571
Signifikan			0.000000

Sumber: data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, pada pengujian dipotesis didapatkan nilai *adjusted R*² sebesar 0.896899 yang menunjukkan bahwa 89.6899% variabel independen menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai statistik F sebesar 23.87571 dan tingkat signifikansi sebesar 0.00000 dimana tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.00000 < 0.05$), maka dapat dijelaskan bahwa model regresi dikatakan baik atau model yang digunakan sudah fit.

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis kedua ditunjukkan untuk membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.11, hasil regresi menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien positif sebesar 0.375367 dan signifikan dengan nilai *p-value* sebesar 0.4736 ($p\text{-value} > 5\%$). Hasil regresi menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan tidak sesuai hipotesis dengan hasil sehingga hipotesis **ditolak**.

4.4.2 Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ketiga ditunjukkan untuk membuktikan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.11, hasil regresi menunjukkan nilai koefisien yaitu -0.042404 dan signifikan dengan *p-value* 0.7535 (*p-value* > 5%). Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis **ditolak**.

4.4.3 Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis keempat ditunjukkan untuk membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel 4.11, hasil regresi menunjukkan nilai koefisien yaitu sebesar -0.073056 dan signifikan dengan *p-value* 0.0362 (*p-value* < 5%). Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis **diterima**.

4.6 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini menjelaskan

bahwa kepemilikan institusional tidak mampu untuk meminimalisasi konflik agensi antara pemegang saham dengan manajer sehubungan dengan tindakan penghindaran pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional maka akan mengurangi tindakan oportunistik dari manajer (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepemilikan institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

Kepemilikan institusional tidak dapat meminimalisasikan konflik agensi karena rata-rata hanya 44.1678% yang dapat dikatakan kepemilikan institusional sedikit. Hal ini menyebabkan kepemilikan institusional kurang berpengaruh dalam hal menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap manajer berhubungan dengan tindakan maupun keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak konsisten dengan penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mampu menurunkan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012); Arlina (2015) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian kepemilikan publik terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak berpengaruhnya kepemilikan publik

terhadap penghindaran pajak menjelaskan bahwa kepemilikan publik tidak mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Kepemilikan oleh publik memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk patuh membayar pajak sehingga publik menginginkan perusahaan untuk patuh terhadap pajak dan kepemilikan oleh publik tidak berorientasi untuk mendapatkan laba. Namun tidak berpengaruhnya kepemilikan publik ini karena pemilik saham publik tidak langsung terlibat secara aktif dalam kegiatan perusahaan, publik hanya dapat melihat hasil yang ditampilkan perusahaan pada laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian Arlina (2015) dimana kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menjelaskan bahwa kepemilikan publik tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak diperoleh hasil bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini menjelaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi mampu membuat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berkurang.

Kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi mampu menurunkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat terlihat pada sampel dimana keseluruhan sampel didominasi oleh perusahaan yang terkonsentrasi

dimana sebesar 77.8% dari keseluruhan sampel. Sejalan dengan teori agensi dimana kepemilikan terkonsentrasi dapat melakukan pengawasan terhadap manajer untuk melakukan tindakan oportunistik yang dilakukannya (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki saham yang terkonsentrasi lebih memilih untuk membayar beban pajak yang lebih tinggi daripada harus berhadapan dengan akibat potensial dari biaya non pajak seperti penalti, sanksi dan reputasi perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi (Rusydi dan Martani, 2014).

Tindakan penghindaran pajak memang berdampak pada pemegang saham, dimana mendapatkan manfaat dari perbedaan permanen dan temporer sehingga mendapatkan manfaat dari tindakan ini. Namun tidak sesuai dengan tujuan pemegang saham yang terkonsentrasi dimana dengan kepemilikan terbesar di dalam perusahaan pemegang saham pengendali lebih ingin melakukan investasi untuk jangka waktu yang relatif panjang pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chen *et. al.* (2010); Rusydi dan Martani (2014); Maretha (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham terkonsentrasi yang tinggi tidak melakukan penghindaran pajak.

4.5.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal

ini menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan maka perusahaan akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak ini dikarenakan perusahaan yang besar akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Teori biaya politik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi perhatian dan sorotan bagi pemerintah ataupun masyarakat (Watts dan Zimmerman, 1986). Hal ini menyebabkan tindakan yang dilakukan perusahaan akan dicermati oleh masyarakat, sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu contohnya yaitu tidak melakukan penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan:

- 1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak mampu untuk menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.
- 2) Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan publik tidak mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan terkonsentrasi menginginkan bahwa perusahaan taat akan pajak guna untuk menjaga reputasi perusahaan tersebut.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini membuktikan bahwa dengan semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi maka penghindaran pajak dapat diminimalisasikan. Namun kepemilikan institusional dan publik tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini akan berguna jika hasil analisisnya dapat dipergunakan sebagai suatu pertimbangan untuk:

- 1) Bagi akademik, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi salah satu mekanisme mengurangi tindakan penghindaran pajak karena adanya reputasi yang akan dijaga perusahaan.

- 2) Perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 terutama perusahaan yang terkonsentrasi tidak melakukan penghindaran pajak, sehingga investor dapat berinvestasi pada perusahaan tersebut.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan diantaranya:

- 1) Penelitian ini jangka waktu relatif singkat sehingga informasi yang diberikan belum cukup menjelaskan secara detail mengenai penghindaran pajak.
- 2) Penghindaran pajak menggunakan *book tax difference* sehingga belum cukup menjelaskan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak karena dilihat dari perbedaan tetap dan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal sedangkan penghindaran pajak juga dapat disebabkan oleh pemilihan metode akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

Ajija, Shochrul R, Syah W. Sari., Rahmat H. Setianto, Martha R. Primanti 2011.
Cara Cerdas Menguasai Eviews. Salemba Empat., Jakarta.

- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, hal. 95-189.
- Arlina, Elna Nandasari. 2015. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya
- Bayu, Titus Santoso. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. "Are Family Firms More Tax Aggressive than Nonfamily Firms?". *Journal of Financial Economics*, Vol.95, hal.41-61.
- Dallas, George. 2004. "Governance and Risk : Analytical Hand Books for Investors, Managers, Directors and Stakeholders, p.21". Standard and Poor. Governance Services, Mc.Graw Hill. New York.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Jaya, Tresno Eko, Yasser, M. Arafat, dan Dinda Kartika. 2014. *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance*. Prosising Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Jensen, M. C., & Meckling W. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3, No 4.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. SSRN : Working Paper.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Purba, Jan Horas V. 2004. Pengaruh Proporsi Saham Publik terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta), *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Vol 4: Hal. 109-116.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rossarzi, Marysa. 2016. Pengaruh Atribut Kualitas Audit Terhadap Biaya Modal Ekuitas dan Tax Avoidance. Skripsi: Universitas Bengkulu
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani. 2014. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance*. Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. "The Relationship between Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies". *Social Responsibility Journal*. Vol.5, No.2, hal. 212-226.
- Setiawati, Annisa Putrantri dan Setiawanta, Yulita. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shleifer, Andrei dan Robert W. Vishney. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *The Journal of Political Economy*

www.bps.go.id

www.idx.co.id